

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai tata kelola perusahaan atau yang disebut dengan *corporate governance* merupakan salah satu pembahasan penting untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa mendatang setelah Indonesia dan di berbagai negara di Asia lainnya yang mengalami krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 (Zhang, Zhang et al. 2001). Baird (2000) mengemukakan bahwa salah satu landasan yang menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan di berbagai negara di Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance*. Buruknya penerapan *corporate governance* yang ada di hampir semua perusahaan, baik perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh pihak swasta. Buruknya pelaksanaan *corporate governance*, menyebabkan tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi berkurang karena investasi yang dilakukan menjadi tidak aman. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru juga enggan untuk melakukan investasi.

Kasus praktik *bad management* yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan melibatkan auditor dalam hal manipulasi laporan keuangan sudah marak terjadi sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya manipulasi laba lainnya terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. Pada audit tahun 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7

miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Dalam kasus ini terbukti bahwa pihak manajemen PT Kimia Farma Tbk melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan (*mark up*) laba bersih di laporan keuangan perusahaan. Selain itu, kasus yang melibatkan KAP Ernest & Young di Indonesia atas audit laporan keuangan PT Indosat Tbk untuk periode 31 Desember 2011, dinyatakan gagal dalam melakukan audit laporan keuangan kliennya oleh Regulator Amerika Serikat. KAP Ernest & Young memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai, sehingga terjadi gagal audit laporan keuangan yang menyebabkan jatuhnya denda sebesar satu juta Dollar Amerika Serikat atau sekitar 13 Miliar Rupiah. Kasus tersebut terungkap berawal ketika KAP Ernest & Young di Amerika Serikat melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit terhadap PT Indosat Tbk tidak didukung data yang akurat, yaitu dalam persewaan empat ribu unit tower selular. Selain itu, KAP Ernest & Young Indonesia juga menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang tidak benar sehingga menghambat proses pemeriksaan. (Situmorang, 2017)

Terjadinya beragam kasus tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik. Menurut DeAngelo (1981), mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Fenomena menurunnya kualitas audit terus bermunculan pada beberapa tahun terakhir. Seperti pada beberapa kasus, auditor tidak dapat menemukan kecurangan dalam laporan keuangan atau auditor menemukan kecurangan namun tidak diungkapkan karena adanya kerjasama antara auditor dan pihak manajemen.

Hal ini sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976) bahwa hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa pemegang saham (*principal*) meminta kepada manajemen (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan principal, dengan cara

mendelegasikan otoritas kepadanya. *Principal* atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak manajemen. Seorang pemegang saham pada dasarnya menginginkan bertambahnya kemakmuran atau kekayaan, namun agent sebagai pihak yang diberi wewenang untuk pengelolaan perusahaan cenderung melakukan sesuatu yang memaksimalkan kepentingannya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Hal ini akan memicu terjadinya masalah keagenan. Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak untuk memperbesar keuntungan diri sendiri akan memaksa pihak manajemen untuk melibatkan auditor dalam praktik bad management. *Principal* akan menilai prestasi agent berdasarkan kemampuannya dalam memperbesar laba perusahaan, sehingga keterlibatan auditor dalam situasi ini dibutuhkan oleh manajemen dan akan semakin memperburuk situasi yang ada. Auditor yang cenderung untuk mengikuti permintaan manajemen akan memperburuk kualitas audit yang dihasilkan. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan corporate governance, sehingga dapat mengurangi adanya praktik bad management.

Corporate governance merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi praktik *bad management*. Cadbury (2000) menyatakan bahwa corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dengan adanya *corporate governance* sebagai suatu sistem yang untuk mengawasi dan mengelola perusahaan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi lain pihak yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Manfaat dari penerapan *corporate governance* bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta meningkatkan layanan kepada stakeholders; mempermudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah yang akan meningkatkan nilai perusahaan; mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Sedangkan manfaat

penerapan corporate governance bagi stakeholders adalah mereka akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan shareholder's value dan dividen (Forum for Corporate Governance Indonesia in Indonesia, 2001).

Corporate governance memiliki dua bentuk, yaitu internal dan eksternal. Tata kelola perusahaan internal atau yang disebut kontrol internal memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan organisasi bisnis dan mencegah penipuan perusahaan. Dengan begitu, sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan internal. Sedangkan kontrol eksternal sebagai bentuk transparansi perusahaan dengan melibatkan pihak luar dalam proses pengawasan perusahaan. Salah satu bentuk konkrit eksternal adalah komisaris independen yang dipilih oleh pemegang saham minoritas dan bertugas mewakili suara pemegang saham minoritas tersebut. Independensi dewan, memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan (Carcello, Hermanson et al. 2002). Efektivitas tata kelola perusahaan sudah berjalan dengan baik dan memenuhi standar, maka dapat dipastikan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan tercapai dengan maksimal. Sehingga risiko kecurangan yang dilakukan manajemen dan risiko audit bagi auditor independen dapat diminimalisir. Kualitas audit yang akan dihasilkan pun menjadi lebih optimal.

Selanjutnya tata kelola yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran komite audit. Ukuran komite audit yang semakin besar mencerminkan adanya peran yang spesialis dan fokus dari anggota komitenya. Semakin fokus dan spesifik pekerjaan komite akan semakin baik dalam melakukan pemantauan masalah keuangan perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan terdapat hubungan positif antara ukuran komite audit dengan kualitas audit. Dengan demikian, meningkatkan permintaan untuk kualitas audit (Abbott, Parker et al. 2003).

Kegiatan operasional perusahaan tidak hanya sebatas dalam upaya manajemen perusahaan saja, namun juga terdapat campur tangan yang besar dari pemilik untuk ikut dalam mengatur kegiatan operasional perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan peran penting dalam efektivitas tata kelola perusahaan,

dimana kepemilikan terkonsentrasi dapat memitigasi atau memperburuk masalah keagenan yang mempengaruhi tata kelola (Setia Atmaja, Tanewski et al. 2009). Shleifer and Vishny (1986) menyebutkan bahwa pemegang saham pengendali yang memiliki lebih banyak insentif dan kekuasaan dapat memantau manajer perusahaan, serta berkontribusi pada pengurangan masalah keagenan. Namun, La Porta, Lopez de Silanes et al. (1997) menjelaskan bahwa dalam pengaturan kepemilikan terkonsentrasi kekayaan pemegang saham minoritas dapat diambil alih oleh pemegang saham utama. Setiap pemerintahan memiliki mekanisme yang berbeda, dimana mekanisme tersebut diterapkan untuk memantau agen dan pemegang saham, seperti auditor eksternal, yang mana dapat memberikan peran pemantauan yang signifikan dalam menguji kredibilitas laporan keuangan yang disediakan oleh manajemen atas nama pemegang saham (Lin, Liu et al. 2009).

Struktur kepemilikan perusahaan yang memiliki konsentrasi sangat tinggi biasanya dapat memicu timbulnya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi, apabila sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang lebih dominan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (Dallas 2004). Ketika kepemilikan tinggi, konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas juga akan mengalami peningkatan. Pemegang saham mayoritas cenderung untuk meningkatkan kemakmurannya dengan melakukan tindakan expropriation dan menikmati manfaat secara privat dari kontrol yang dimilikinya dan akan merugikan pemegang saham minoritas.

Perusahaan yang sudah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik namun dalam proses tata kelolanya diintervensi oleh pemegang saham mayoritas maka hal tersebut akan mengganggu jalannya proses operasi perusahaan. Gangguan tersebut akan berdampak pada resiko yang akan dialami perusahaan dan selanjutnya akan berdampak pada hasil opini yang akan diterima perusahaan. Sehingga pada konteks ini kepemilikan saham perusahaan merupakan faktor yang dapat melemahkan hubungan tata kelola dengan kualitas audit.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Menurut AlQadasi and Abidin (2018), Zureigat Q M (2011), perusahaan yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi cenderung menuntut kualitas audit yang negatif daripada perusahaan yang memiliki konsentrasi kepemilikan rendah. Sedangkan menurut Adeyemi and Fagbemi (2010), Awadallah (2018), Ben hassoun, *et al* (2018), konsentrasi kepemilikan sangat berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah ownership concentration dapat memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap kualitas audit?
4. Apakah ownership concentration tidak memoderasi pengaruh komite audit terhadap kualitas audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibentuk, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris adanya pengaruh komisaris independen terhadap kualitas audit.
2. Memperoleh bukti empiris adanya pengaruh komite audit terhadap kualitas audit.
3. Memperoleh bukti empiris adanya ownership concentration mampu memoderasi pengaruh komisaris independent terhadap kualitas audit.
4. Memperoleh bukti empiris adanya ownership concentration tidak memoderasi pengaruh komite audit terhadap kualitas audit.

1.5 Kontribusi Riset

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan berbagai manfaat, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu Akuntansi, khususnya terkait dengan tata kelola perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait komisaris independen dan komite audit, khususnya bagi proses tata kelola perusahaan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pengambil Kebijakan Dalam Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah referensi bagi pengambil kebijakan atau pengambil keputusan dalam perusahaan untuk meningkatkan transparansi pada laporan perusahaan dengan meningkatkan kualitas audit dan untuk meningkatkan nilai-nilai tata kelola perusahaan, khususnya nilai-nilai tata kelola perusahaan dengan mempertimbangkan keberadaan komisaris independen dan komite audit untuk meningkatkan transparansi laporan perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan bagi investor dalam mengalokasikan dana investasinya terutama pada perusahaan yang menerapkan *good corporate governance*. Selain itu, penerapan nilai-nilai internal corporate governance yang baik dan keberadaan ownership concentration menjadi sebuah pertimbangan bagi investor guna mengalokasikan dana investasinya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal tesis ini dibagi menjadi lima (5) bab yang berhubungan satu dengan lainnya. Secara sistematis penelitian ini dibagi menjadi:

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai fenomena yang menjadi latar belakang dalam penelitian, dan juga menjelaskan bagaimana pentingnya internal *corporate governance* dalam meningkatkan transparansi dalam laporan perusahaan. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan bagaimana logika teoritis yang mendasari pentingnya penerapan internal *corporate governance* guna meningkatkan kualitas audit serta bagaimana keberadaan ownership concentration mampu meningkatkan upaya tersebut. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang dibentuk

serta tujuan yang hendak dicapai berdasarkan fenomena yang ada.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dilakukan penulis seperti teori agensi, corporate governance, kualitas audit, konsentrasi kepemilikan, serta beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan, hipotesis penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu menggunakan metode kuantitatif. Bab ini juga menjelaskan mengenai variabel penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode analisis regresi logistic.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian serta deskripsi hasil penelitian. Hasil analisa data yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kualitas audit dengan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel pemoderasi serta pengujian hipotesis.

Bab 5 Simpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap kualitas audit dengan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel pemoderasi. Selanjutnya adalah keterbatasan dalam menguji variabel penelitian dan saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.